

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y, & Rusfiana, Y. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Jatinangor: ALFABETA.
- Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1). 1-11.
- Andriany, S., Ariyanti. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Volume* 6(1). 35-52.
- Annur, C. M. (2023). Mayoritas Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Berasal dari Pemerintah Pusat. Diakses pada 16 April 2024 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/28/mayoritas-kasus-korupsi-yang-ditangani-kpk-berasal-dari-pemerintah-pusat>
- Annur, C.M. (2023). Indonesia Negara Terkorup ke-5 di Asia Tenggara pada 2022. Diakses pada 16 April 2024 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>
- Ardi, Donna F. I, Djonet Santoso, Nursanty. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Center) Diskominfo Kota Bengkulu. *Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP)*, 1(1), 41-55.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2018). *RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2020). Infografis Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (17 Kategori) di Provinsi Jawa Tengah (Persen) 2021-2022. Diakses pada 6 September 2024 dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyNCMy/persentase-penduduk-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama--17-kategori--di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa) 2022-2023. Diakses pada 6 September

2024 dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzY2IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) 2023. Diakses pada 6 September 2024 dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg3MyMy/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah.html>

Bibi, Shehnaz, dkk. (2022). Implementation Status of Proactive Disclosure of Information: a Comparative Study of Khyber Pakhtunkhwa and Punjab, Pakistan. *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS)* 3(1). 322-335.

Cahyaningtyas, G. K., W., & Herawati, N. R. (2017). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA SEMARANG, STUDI KASUS: Masyarakat Pengguna Pusat Informasi Publik (PIP) Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 141-150. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/17623>.

Chairunnisa, L, dkk. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 11(2), 31-45.

Choi, Jeong Min. 2018. "Factors Influencing Public Officials' Responses to Requests for Information Disclosure." *Government Information Quarterly* 35(1): 30–42.

Degedona, Laurensia P, dkk. (2021). Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISPOL)*, 1(2), 242-256.

Fauziyah, Indah Annisa, dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi. *Jurnal Administrasi Negara (JANE)*, 14(1). 224-237.

Ferdaus, F., Zaimasuri, Z. (2023). Implementation of Public Information Disclosure Policy in The House of Representatives of The Republic of Indonesia. *Journal of Governance and Accountability Studies (JGAS)*, 3(1). 29-50.

Fiantika, F. R, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Gubernur Provinsi Jawa Tengah. (2010). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah*. Semarang.

- Gubernur Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Penetapan Anggota dan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026*. Semarang.
- Gubernur Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pad Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang.
- Hayat. (2018). *KEBIJAKAN PUBLIK: Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang: Intrans Publising.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3). 13-26.
- Huang, Hsini, Calvin Zhou Peng Liao, Hsin Chung Liao, and Don Yun Chen. 2020. "Resisting by Workarounds: Unraveling the Barriers of Implementing Open Government Data Policy." *Government Information Quarterly* 37(4): 101495. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101495>.
- Ihsan, D. N. (2023). Mantap! Keterbukaan Informasi Publik di Jateng Masuk 10 Besar Nasional. Diakses pada 15 April 2024 dari <https://jateng.solopos.com/mantap-keterbukaan-informasi-publik-di-jateng-masuk-10-besar-nasional-1661030>
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran RI Nomor 4846. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Jakarta.
- Indonesiabaik.id. (2023). Keterbukaan Informasi Publik Semakin Tinggi. Diakses pada 12 April 2024 dari <https://indonesiabaik.id/infografis/keterbukaan-informasi-publik-semakin-tinggi>
- Keban, Y. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Khoiron, A.M., Kusumastuti, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Komisi Informasi Pusat. (2021). *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik*. Jakarta.
- Komisi Informasi Pusat. (2023). *Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa*

Tengah Nomor 03/KPTS/KI-JTG/XII/2023 tentang Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Semarang

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. (2023). Laporan Tahunan Tahun 2023. Semarang. 97 hal.

Laksono, Puji. 2019. "Kuasa Media Dalam Komunikasi Massa." *Al-Tsiqoh (Dakwah dan ekonomi)* 4(2): 49–61.

Lubis, Muharman, Tien Fabrianti Kusumasari, and Lukmanul Hakim. 2018. "The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses." *International Journal of Electrical and Computer Engineering* 8(1): 94–103.

Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(II). 324-334.

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Junal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3). 145-151.

Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 3(2). 147-151.

Nurhanisah, Y, Andrean W, Finaka. (2024). Semangat Berbenah! Indeks Persepsi Korupsi Belum Membaik. Diakses pada 16 April 2024 dari <https://indonesiabaik.id/infografis/semangat-berbenah-indeks-persepsi-korupsi-belum-membaik>

Nurhanisah, Y. (2023). Keterbukaan Informasi Publik Semakin Tinggi. Diakses pada 23 Desember 2024 dari <https://indonesiabaik.id/infografis/keterbukaan-informasi-publik-semakin-tinggi>

Nurhidayat, Ipan. 2023. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 1(1): 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2023). Triwulan I 2023, Ekonomi Jateng Tumbuh Lampau Nasional. Diakses pada 7 September 2024 dari <https://jatengprov.go.id/publik/triwulan-i-2023-ekonomi-jateng-tumbuh-lampau-nasional/>

PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2023). Laporan Tahunan Layanan

Informasi Publik Tahun 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Semarang. 43 hal.

PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I 2024*. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Semarang. 18 hal.

Prameswari, L. B, Nurul Hayat. (2023). KIP: IKIP bukan Ajang Kompetisi sehingga Daerah Harus Objektif. Diakses pada 15 April 2024 dari <https://www.antaranews.com/berita/3590448/kip-ikip-bukan-ajang-kompetisi-sehingga-daerah-harus-objektif>

Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Provinsi Jawa Tengah. (2012). *Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: Semarang.

Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: Semarang.

Putri, Resky Ananda. (2021). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto. (Skripsi, Universitas Hasanuddin). Diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8935/>

Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz, Ricky. 2023. “Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12(2): 62–75.

Ramadhan, A. B. (2023). Kapolri Ungkap 431 Kasus Korupsi di 2023 yang Bikin Rugi Negara Rp. 3, 6 T. Diakses pada 15 April 2024 dari <https://news.detik.com/berita/d-7110574/kapolri-ungkap-431-kasus-korupsi-di-2023-yang-bikin-rugi-negara-rp-3-6-t>

Retnowati, Endang. 2012. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance.” *Journal Perspektif* 17(1): 54–61.

Siagian, S. P. (2008). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, AG. (2005). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Subianto, A. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: PT. Menuju Insan Cemerlang.

Ulaan, Alnoputra L, dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance* 2(1). 1-9.

Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Widianto, F., Nasution, M. A. (2022). Pengaruh Perilaku Konsumen dan Perubahan Pasar Terhadap Tingkat Penjualan Wuling di PT. Arista Jaya Lestari Cabang SM Raja Medan. *EMANIS: Journal Economic Management and Business*, 1(2). 169-175.

Wikipedia. (2006). Peta Administratif Jawa Tengah. Diakses pada 5 September 2024 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_administratif_jawa_tengah.gif
Perkim.id. (2020). PKP Jawa Tengah. Diakses pada 5 September 2024 dari <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-jawa-tengah/>

42 Laporan Tahunan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023